

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2014 menurut data statistik BPS jumlah penduduk Jakarta mencapai 10.075.3 ribu orang, sementara di tahun 2016 sebanyak 10.252.637 ribu orang¹. Berdasarkan data tersebut kepadatan penduduk di Jakarta mengalami kenaikan sebanyak 200 ribu orang, jika ditelaah berdasarkan tahunnya hanya berjarak 2 tahun. Ini menandakan bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan kurang lebih 100 ribu orang. Penambahan penduduk tersebut diakibatkan dari angka kelahiran yang tinggi dan migrasi penduduk atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain.

Perpindahan penduduk tersebut memiliki berbagai alasan yaitu, karena pekerjaan di Ibu Kota Negara atau Jakarta memiliki pendapatan yang besar sehingga perpindahan penduduk terus bertambah, terutama menjelang arus balik lebaran karena banyak masyarakat Jakarta yang membawa saudaranya untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Perpindahan penduduk tersebut akan mengakibatkan peningkatan persaingan antar perantau dengan penduduk asli Jakarta dalam mencari pekerjaan dan akan meningkatkan angka pengangguran di Jakarta.

¹ <https://jakarta.bps.go.id/publication/2017/05/26/967b4c931db932d7f58641bc/Statistik-kesejahteraan-Rakyat-Provinsi-dki-Jakarta-2016.pdf> diakses pada 27 Desember 2017

Jika dilihat dari usia penduduk Jakarta antara 15-64 tahun sebesar 71,68% dari jumlah keseluruhan penduduk Jakarta. Lebih dari setengah penduduk Jakarta pada usia kerja atau usia produktif. Namun saat ini yang menjadi masalah besar dari usia produktif tersebut adalah pendidikan, apakah semua orang di usia produktif itu berpendidikan minimal SMA Sederajat atau di bawahnya? Ini yang menjadi polemik bagi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Ibu Kota Negara.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari berbagai macam aspek salah satunya yaitu pendidikan, pendidikan merupakan aspek terpenting dalam memajukan negara karena pendidikan ialah sebuah proses memanusiakan manusia. Lewat pendidikan manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti dan lain sebagainya, maka dari itu pendidikan merupakan sebuah aspek yang harus dirasakan oleh berbagai pihak didalam sebuah negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Alinea ke-4 negara Indonesia memiliki tujuan, salah satu pointnya ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan baik secara langsung yang dapat dirasakan ataupun yang tidak dapat dirasakan. Namun saat ini pendidikan yang ada di negara kita, masih sangat memprihatinkan, baik dari sarana maupun prasarana pendidikan, termasuk kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas serta mahalnya biaya pendidikan akibatnya banyak masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk putus sekolah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi masalah angka putus sekolah yaitu dengan program wajib belajar 9 tahun, namun program tersebut tidak berjalan dengan semestinya, kemudian digantikan dengan wajib belajar 12 tahun diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengikuti program tersebut sehingga angka melek huruf akan bertambah. Selain program wajib belajar 12 tahun yang saat ini dijalankan, selain program diatas pemerintah memberikan bantuan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut dengan dana BOS, merupakan bantuan yang membuat pembiayaan sekolah gratis seperti tidak adanya Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP bagi sekolah negeri dan tidak diwajibkan siswa untuk membeli buku pelajaran karena sudah disediakan oleh pihak sekolah melalui dana BOS. Ketika pemerintah sudah melakukan berbagai macam program Khusus daerah Jakarta, pemerintah daerah telah membuat suatu program kartu jakarta pintar (KJP) namun masih banyak masyarakat yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya hidupnya dan memutuskan untuk bekerja membatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak ada alasan bagi masyarakat DKI Jakarta untuk putus sekolah karena sudah diberikan berbagai macam fasilitas-fasilitas dibidang pendidikan tak terkecuali mengenai kebutuhan hidup. Tak dapat dipungkiri angka putus sekolah tetap saja menghantui masyarakat Indonesia, tak terkecuali Ibukota Negara sebuah kota metropolitan dan sebuah pusat pradaban di Indonesia yang tidak luput dari kasus putus sekolah. Menurut BPS, pada tahun 2016

sekitar 8.461.373 jiwa penduduk DKI Jakarta yang berumur 10 tahun ke atas, 125.852 jiwa diantaranya tidak/belum pernah sekolah atau sekitar 1,49 persen, sebagian besar didominasi oleh kaum perempuan yaitu sebanyak 91.760 jiwa atau 72,91 persen dari total penduduk yang tidak/belum pernah sekolah.² Angka putus sekolah merupakan sebuah masalah yang harus dihadapi oleh setiap pemerintah dan angka putus sekolah memiliki beberapa alasan salah satunya ialah mengenai kebutuhan pokok.

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi, maka dari itu banyak anak yang putus sekolah untuk membantu orang tuanya dalam mencari nafkah. Namun saat ini pemerintah terus memerangi angka putus sekolah di Jakarta dengan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). KJP merupakan sebuah dana bantuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin Jakarta, dana bantuan tersebut sebesar Rp.375.000/bulan untuk SMA Negeri dan SMA Swasta sebesar Rp.665.000 yang terdiri dari Rp.375.000/bulan untuk uang saku siswa dan Rp. 290.000/Bulan untuk SPP³. Namun dana KJP memiliki 2 tahap pencairan yaitu pencairan rutin dan pencairan berkala. Dana rutin pencairannya setiap tanggal 5 di awal bulan sebesar Rp. 200.000 dan dana berkala pencairannya setiap diakhir semester sebesar Rp. 175.000. Diharapkan dengan bantuan dana tersebut membuat angka putus sekolah menjadi berkurang.

Sebelum program KJP dikeluarkan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta kebijakan yang digunakan mengenai Program wajib belajar 6 (enam) tahun

² Ibid

³ https://kjp.jakarta.go.id/kjp1/public/informasi_umum diakses pada tanggal 28 Desember 2017

dilanjutkan dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun pada masa Orde Baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Aturan tersebut kemudian dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Kebijakan pemerintah selanjutnya yaitu dengan Program Indonesia Pintar (PIP) yang mewajibkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, kebijakan tersebut dijalankan pada tahun 2014 yang tertera pada RPJMN 2015-2019.⁴

Setelah berlangsungnya program wajib belajar 12 tahun, di tahun yang sama pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang memiliki tujuan yaitu: Mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Siswa yang mendapatkan KJP harus memiliki beberapa kriteria antara lain : warga provinsi DKI Jakarta, terdapat di satuan pendidikan provinsi DKI Jakarta, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Pada tahun 2017 tahap II sekitar 778.405 siswa telah menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), jenjang pendidikan yang paling banyak menerima KJP adalah jenjang SD sebanyak 396.642 akan tetapi jenjang SMA dan Sederajat jumlah

⁴ Anggi Afriansyah, *Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan*, (Jurnal Kependudukan Indonesia: 2017) h.56

siswa yang menerima KJP Sebanyak 37.866 terdiri dari 17.580 SMA Negeri dan 20.435 SMA Swasta.

Dana KJP yang telah diterima diperuntukan untuk membeli peralatan sekolah sehingga tak ada lagi alasan untuk melanjutkan sekolah dikarenakan biaya pendidikan yang tinggi. Untuk sekolah SMA Swasta mendapatkan dana tambahan berupa pembayaran SPP, ini membuat Orangtua bebas memasukan anaknya ke SMA-SMA di Jakarta karena dengan dana KJP biaya pendidikan bisa teratasi. Namun dana KJP yang seharusnya digunakan untuk dana Pendidikan banyak di selewengkan oleh pihak-pihak tertentu. Pada tahun 2015 lalu sekitar 20 anak telah menyelewengkan dana KJP, menurut data transaksi yang direkapitulasi oleh Bank DKI ada beberapa transaksi yang disalah gunakan oleh siswa yang menerima KJP seperti membeli bahan bakar minyak, dipakai untuk karaoke, membeli barang elektronik, dan membeli emas.⁵ Selain itu banyak para pedagang yang mulai berani untuk mencairkan dana KJP dengan imbalan potongan sebesar 10%, ini terjadi di pasar Cengkareng Jakarta Barat, pasar Pal Merah Jakarta Barat, dan Mall Cityloft Jakarta Pusat. Akibat perilaku para pedang maka pemda DKI Jakarta dapat mencabut izin usahanya sehingga pedagang yang melaukan hal tersebut tidak mendapatkan izin untuk membuka usahanya.⁶

Pada kasus tersebut mengidentifikasi bahwa penerima dana KJP tidak tepat sasaran karena dana bantuan tersebut dipergunakan tidak semestinya. Kasus

⁵<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/04/22472601/Bantuan.KJP.Diselewen%20gkan> diakses pada tanggal 27 Desember 2017

⁶ <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160722192917-20-146440/penyalahgunaan-kjp-masih-terjadi> diakses pada tanggal 27 Desember 2017

tersebut membuat pemerintah DKI Jakarta membuat larangan untuk siswa yang menerima KJP, dengan salah satu sanksinya yaitu pencabutan beasiswa KJP dan bahkan bisa dilaporkan ke Polisi.

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerima KJP PerWilayah 2017
Tahap II**

No	Wilayah	Zona	Jumlah	%
1	ADM KEP SERIBU	1	3691	0,47 %
2	JAKARTA BARAT	1	107066	13,76 %
3	JAKARTA BARAT	2	75841	9,75 %
4	JAKARTA PUSAT	1	36472	4,72 %
5	JAKARTA PUSAT	2	49196	6,32 %
6	JAKARTA SELATAN	1	72017	9,26 %
7	JAKARTA SELATAN	2	78599	10,10%
8	JAKARTA TIMUR	1	131181	16,86 %
9	JAKARTA TIMUR	2	82931	10,66 %
10	JAKARTA UTARA	1	63954	8,22 %
11	JAKARTA UTARA	2	76840	9,88 %
TOTAL			778058	100.00 %

Sumber: Kantor KJP

Evaluasi program atau kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal dana pendidikan merupakan sebuah masalah yang menarik untuk di teliti, berdasarkan data diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Suku Dinas pendidikan wilayah 1 Jakarta Timur karena di wilayah tersebut jumlah peserta didik dan jumlah sekolah menjadi yang terbanyak sehingga bantuan KJP yang paling banyak di daerah tersebut, dan peneliti memfokuskan penelitian di SMAN 54 Jakarta dan SMA Yayasan Karya Enam-Enam Karena SMA tersebut berada di wilayah pendidikan I Jakarta Timur dan wilayah tersebut merupakan wilayah terbanyak menerima KJP.

SMA 54 Jakarta dan SMA YAKE memiliki masalah yang sama dalam hal administrasi yaitu dalam hal pengumpulan berkas yang sering mengalami keterlambatan, dalam hal pertanggung jawaban masih banyak siswa yang mengabaikan pertanggung jawaban mengenai dana bantuan yang telah Ia gunakan. Jika dilihat dari segi ekonomisnya masalah yang muncul yaitu ketika walikelas melakukan survei ke tempat tinggal calon penerima bantuan banyak diantaranya yang memiliki tempat tinggal di atas rata-rata namun masih ingin menerima bantuan, dilihat dari pekerjaan orang tua masih ada siswa yang kedua orang tuanya berkerja namun masih mendaftar sebagai calon penerima KJP. Serta alasan selanjutnya yaitu, kedua SMA tersebut mewakili penerima KJP baik di SMA negeri dan SMA swasta. Dalam hal survei tepat tinggal kedua SMA tersebut berbeda, jika di SMAN 54 Jakarta survei tempat tinggal dilaksanakan setiap priode penerima KJP baik penerima yang lama maupun penerima baru namun di SMA Yayasan Karya Enam-enam survei dilakukan jika penerima pindah rumah dan untuk penerima baru suervei tetap dilalukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa program kartu jakarta pintar memiliki berbagai kendala, mulai dari perekrutan atau pencarian penerima KJP, survei tempat tinggal penerima KJP, persyaratan KJP, Pencairan dana KJP, penanggung jawaban dana KJP dan berbagai macam kendala lainnya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas dapat diketahui bahwa masalah program kartu jakarta pintar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat luas. Karena faktor faktor yang sangat luas maka masalah program KJP di batasi dengan penerima KJP yang tepat sasaran, penggunaan dana KJP dan dampak KJP bagi siswa, maka penelitian ini dibatasi pada masalah “Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (Studi Kasus: SMAN 54 Jakarta dan SMA Yayasan Karya Enam-Enam)“ Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada: Evaluasi program dengan menggunakan model CSE-UCLA, model ini dipilih karena sesuai dengan ketentuan KJP. Maka model CSE-UCLA adalah: *Need assessment, Program planning, Formative Evaluation, Summative Evaluation* Model evaluasi ini dikembangkan oleh Fernandes (1984). Menurut Alkin (1996) evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih alternatif.⁷

D. Perumusan Masalah

Masalah pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam *Need Assessment* Program Kartu Jakarta Pintar berkaitan dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai ?

⁷ Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.15

2. Bagaimana *program planning* yang terdapat dalam Program Kartu Jakarta Pintar sesuai dengan Pergub No 174 Tahun 2015
3. Bagaimana *Formative Evaluation* dari Program Kartu Jakarta Pintar berkaitan dengan pelaksanaan program yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
4. Bagaimana *Summatif Evaluation* dari Program Kartu Jakarta Pintar berkaitan dengan dampak terhadap penerima bantuan

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis memiliki kegunaan dalam bidang pendidikan sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru dan menambah referensi informasi di bidang pendidikan yang terkait dengan program beasiswa Kartu Jakarta Pintar.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam menggunakan dana beasiswa KJP dengan sebaik baiknya guna memenuhi kebutuhan dibidang pendidikan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk mengembangkan program pendidikan dan digunakan sebagai bahan kajian dalam mengevaluasi program kartu jakarta pintar (KJP)

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai program pemerintah di bidang pendidikan. Serta menjadi bahan literatur dan kajian mengenai evaluasi kartu jakarta pintar

d. Bagi Fakultas Ekonomi

Hasil penelitian diharapkan menjadi koleksi dan sumber bahan pustaka dan bahan bacaan, bagi mahasiswa Pendidikan Ekonomi dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.